



**STRATEGI MASYARAKAT SIPIL DALAM MEMPENGARUHI
PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH**

**“Studi Advokasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada
Tahun 2017 Terhadap Implementasi UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Dan Retribusi Daerah”**

SKRIPSI

Disusun Oleh

PETRARITOS ANTARIXONI AMI KANA LOBO

1673150002

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos)**

ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2020



HASIL UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Petrarites Antarixoni Ami Kana Lobo
Nomor Induk Mahasiswa : 1673150002
Prodi Peminatan Studi : Ilmu Politik

TELAH MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Berjudul

**STRATEGI MASYARAKAT SIPIL DALAM MEMPENGARUHI
PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH**

**"Studi Advokasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada
Tahun 2017 Terhadap Implementasi UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Dan Retribusi Daerah"**

dan dinyatakan LULUS dengan Nilai/Prodiikat

Jakarta 13 Agustus 2020

Ketua Sidang/Penguji III

(Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si)

Penguji II

(Audra Jovimi, S.Sos., MPS)

Penguji I

(Dr. Osbin Samosir, M.Si)

Mengetahui

Dekan

(Angel Damayanti, M.Si., M.Sc., Ph.D)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Mayjen Sutoyo, No. 2 Cawang – Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 8092425, 8009190, 80885230 / Fax. (021) 8093948
Homepage: <http://www.uki.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Petraritos Antarixoni Ami Kana Lobo
Nomor Induk : 1673150002
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Strategi Masyarakat Sipil Dalam Mempengaruhi
Perubahan Kebijakan Pemerintah “Studi Advokasi Komite
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2017
Terhadap Implementasi UU No.28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Dan Retribusi Daerah”

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, doktor), baik di Universitas Kristen Indonesia maupun perguruan tinggi lain.
2. Pernyataan atau pendapat dari orang lain yang terdapat dalam skripsi ini sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jakarta, 13 Agustus 2020
Yang bertanda tangan di bawah ini,



Petraritos Antarixoni Ami Kana Lobo
1673150002



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Mayjen Sutoyo, No. 2 Cawang – Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 8092425, 8009190, 80885230 / Fax. (021) 8093948
Homepage: <http://www.uki.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Petraritos Antarixoni Ami Kana Lobo
Nomor Induk : 1673150002
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Strategi Masyarakat Sipil Dalam Mempengaruhi Perubahan Kebijakan Pemerintah “Studi Advokasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2017 Terhadap Implementasi UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah”
Diajukan : Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos)

Telah diujikan pada

Jakarta, 13 Agustus 2020

Penguji I

(Dr. Osbin Samosir. M.Si)

Penguji II

(Audra Jovani. S.Sos., MPS)

Mengetahui

Ketua Program Studi

(Fransiskus X. Gian Tue Mali. M.Si)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Mayjen Sutoyo, No. 2 Cawang – Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 8092425, 8009190, 80885230 / Fax. (021) 8093948
Homepage: <http://www.uki.ac.id>

PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Petraritos Antarixoni Ami Kana Lobo
Nomor Induk Mahasiswa : 1673150002
Jurusan/ Peminatan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Strategi Masyarakat Sipil Dalam Mempengaruhi
Perubahan Kebijakan Pemerintah “Studi Advokasi
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Tahun 2017 Terhadap Implementasi UU No.28
Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah”

Telah memperbaiki skripsi sesuai dengan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang
Ujian Skripsi sebagaimana tertulis dalam “Hasil Ujian Skripsi” pada tanggal,

Jakarta, 20 Agustus 2020

Ketua Sidang/ Penguji III

(Fransiskus X. Gian Tue Mali. M.Si)

Dosen Penguji I

(Dr. Osbin Samosir. M.Si)

Dosen Penguji II

(Audra Jovani. S.Sos., MPS)

MOTTO

Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.

(YEREMIA 1:5)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat karuniaNya penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Masyarakat Sipil Dalam Mempengaruhi Perubahan Kebijakan Pemerintah” “Studi Advokasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Tahun 2017 Terhadap Implementasi Uu No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah”, sebagaisalah satu persyaratan akademik yang harus penulis tempuh sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos).

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak tantangan baik dalam persiapan, pelaksanaan maupun penyusunan skripsi ini, namun berkat kerja keras dan dukungan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2. Ibu Angel Damayanti, M.Si, M.Sc, Ph.D , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Fransiskus Xaverius Gian Tue Mali S.Ikom, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia dan juga sebagai dosen pembimbing yang telah menyetujui pengajuan skripsi ini, memberikan motivasi, masukan dan bimbingan dengan sabar, serta mempercayakan penelitian ini kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Bapak Robert Na Endi Jaweng selaku Direktur Eksekutif KPPOD, Ibu Regina selaku administrasi KPPOD, Bapak Herman N. Suparman, Bapak Boedi Rheza, Bapak Rezki, Bapak Ekas, Ibu Henny, Ibu Ayumi, Ibu Naomi,

yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan magang, membimbing dan membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi serta membantu peneliti dalam mendapatkan data-data skripsi.

5. Para dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta semangat selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Julfrio Gultom S.H selaku staf di Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia yang selama ini telah membantu peneliti dalam proses administrasi dan persiapan pada saat sidang proposal skripsi sampai sidang skripsi.
7. Gereja Kristen Getsemani (GKG) Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah memberikan dukungan melalui program beasiswa kepada peneliti, doa, dan semangat selama proses penulisan skripsi.
8. Keluarga tercinta Bapak Ferdinand Lobo dan Ibu Andal Dosianis Ruhama Loni Rohi, saudara perempuan Aplianita E.L. Lobo, Fridarlin M.N.W. Lobo, Agnestin M. F. Lobo, dan saudara laki-laki Ade Pither T.K. Lobo, serta ke 6 orang ponaan kandung (Melati, Angel, Prety, Nila, Ingka) serta keluarga besar yang selalu mendukung peneliti dalam doa, semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi dari awal sampai akhir.
9. Kekasih hati Jenin Marselina Bessie (ina bo'i sue) yang selalu mendoakan, menemani, membantu dan perhatian untuk peneliti dari awal pengerjaan skripsi sampai akhir.
10. Mama Moni selaku orang yang berjuang ketika mencari beasiswa sampai daftar masuk ke Universitas Kristen Indonesia dan yang terus mendoakan peneliti selama kuliah.
11. Sahabat-sahabat angkatan 2016 di Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (Ruben, Amanda, Angel) dan semua sahabat-sahabat di Asrama Yap Tiam Hien dari angkatan 2016,2017,2018,2019 yang setia memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti dalam proses pengerjaan skripsi.

12. Teman/adik NTT di Asrama Yap Tiam Hien yang sudah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi, terutama kepada Esaf yang sudah berkorban cuci kotak makan, mengantar makanan dan minuman selama peneliti mengerjakan skripsi.
13. Bapak Syukurman Zebua, S.Pd.K.,M.Pd.K dan keluarga selaku pimpinan Asrama Yap Thiam Hien Universitas Kristen Indonesia (Asrama YTH UKI) periode 2016-2020 yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Ka Eka sebagai pemimpin kelompok kecil (PKK) peneliti dan Ka Sherly sebagai penasihat peneliti ketika melayani di persekutuan mahasiswa fisipol yang sudah setia mendampingi dan menjaga kerohanian serta mendoakan dari semester satu hingga selesai sidang serta teman kelompok kecil (TKK) peneliti yaitu Ruben Rumbiak.
15. Anak kelompok kecil (AKK) Fisipol, vokasi dan Teknik (Erik, Andrew, Indra, Stiven, dan Wendi) yang mendoakan peneliti selama pengerjaan skripsi.
16. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mendukung peneliti melalui materi dan doa dalam proses pengerjaan skripsi.

Penulis sangat menyadari didalam penulisan ini, terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, 19 Agustus 2020



Petraritos Antarixoni Ami Kana Lobo

DAFTAR ISI

HASIL UJIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Signifikansi Penelitian	6
1.5 Kajian Literatur	7
1.6 Landasan Teori	10
1.6.1 Civil Society	10
1.6.2 Definisi <i>Civil Society</i>	11
1.6.3 Fungsi dan Peran <i>Civil Society</i>	13
1.6.4 Karakteristik <i>Civil Society</i>	14
1.7 Advokasi	15
1.7.1 Tujuan Advokasi	21
1.8 Bagan Alur Berpikir	22
1.9 Metode Penelitian	26
1.9.1 Pendekatan Penelitian	26
1.9.2 Langkah-langkah Penelitian	27

1.9.3	Subyek Penelitian	27
1.9.4	Sumber Data	28
1.9.5	Teknik Pengumpulan Data	30
1.9.6	Teknik Analisa Data	32
1.9.7	Instrumen Penelitian.....	33
1.10	Sistematika Penulisan	34
BAB II	35
OBJEK ADVOKASI KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN		
OTONOMI DAERAH		
2.1	Landasan Berpikir UU No.28 Tahun 2009	35
2.2	Gambaran Umum UU No.28 Tahun 2009.....	40
2.3	Pajak	43
2.3.1	Pengertian Pajak	43
2.3.2	Fungsi Pajak	44
2.3.3	Jenis-jenis Pajak.....	46
2.4	Retribusi	47
BAB III	49
GAMBARAN HASIL ANALISIS KPPOD TENTANG PASAL-PASAL		
BERMASALAH		
3.1	Gambaran Hasil Analisis KPPOD.....	49
3.2	Gambaran Pasal Bermasalah dalam Implementasi UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	53
3.2.1	Hasil Analisis KPPOD Terhadap Pajak Hotel	53
3.2.2	Hasil Analisis KPPOD Terhadap Pajak Restoran	56
3.2.3	Hasil Analisis KPPOD Terhadap Pajak Penerangan Jalan	59
3.2.4	Alasan Memilih Pajak Hotel, Restoran, dan Penerangan Jalan ..	62
BAB IV	65
PEMBAHASAN DAN ANALISIS STRATEGI ADVOKASI KPPOD		
4.1	Gambaran KPPOD sebagai Lembaga Masyarakat Sipil	65
4.2	Tujuan Advokasi KPPOD	67
4.3	Strategi Advokasi KPPOD	69

4.3.1	Strategi Pra advokasi	73
4.3.2	Strategi Advokasi	79
4.4	Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Advokasi	
KPPOD	83
4.4.1	Faktor Pendukung	83
4.4.2	Faktor Penghambat	87
BAB V	90
PENUTUP	90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97

DAFTAR LAMPIRAN

- Daftar Lampiran 1 : Kajian KPPOD ke Jawa Timur, 28 Februari 2018
- Daftar Lampiran 1 : Kajian KPPOD ke Riau, 1 Maret 2018
- Daftar Lampiran 2 : Kajian KPPOD ke Sulawesi Selatan, 9 Maret 2018
- Daftar Lampiran 2 : Kajian KPPOD ke Kalimantan Timur, 16 Maret 2018
- Daftar Lampiran 3 : Kajian KPPOD ke provinsi Nusa Tenggara Timur, 27 Maret 2018
- Daftar lampiran 3 : FGD KPPOD dengan Kepala Pusat Perancangan UU DPR RI, KSI dan APINDO
- Daftar lampiran 4 : Foto daftar hadir media yang di undang KPPOD
- Daftar Lampiran 5 : Diskusi Media KPPOD dengan Pemerintah, media masa, dan para jurnalis
- Daftar Lampiran 6 : Seminar KPPOD bersama Pemerintah, pelaku usaha, akademisi 20 Juli 2018

DAFTAR SINGKATAN

APINDO	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
FGD	: Focus Group Discussion
K/L	: Kementrian/Lembaga
KPPOD	: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
KSI	: Knowledge Sector Initiative
OSS	: Online Single Submission
PDRD	: Pajak dan Retribusi Daerah
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PPJ	: Pajak Penerangan Jalan
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
RUU	: Rencana Undang-Undang
SBMI	: Serikat Buruh Migran Indonesia
STAN	: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-undang

DAFTAR GAMBAR

1.8 Bagan Alur Berpikir	25
-------------------------------	----

ABSTRAK

Pajak dan retribusi daerah yang dimuat dalam UU No.29 tahun 2009 merupakan payung hukum bagi pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat. Pungutan yang terdiri atas pajak dan retribusi merupakan pemasukan terbesar bagi negara, kehadiran pajak dan retribusi daerah juga tidak hanya soal budget tetapi pajak dan retribusi daerah diarahkan untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat. Sepanjang perjalanan UU No.28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah selama ini, terdapat masalah yang sangat signifikan yaitu adanya pasal-pasal yang bermasal dalam implementasinya antara lain yaitu Pasal 32 ayat 1,2,3, pasal 35 ayat 1, tentang pajak Hotel, pasal 37 ayat 1,2,3, pasal 40 ayat 1, tentang Pajak restoran, pasal 54 ayat 1,2, pasal 55 ayat 1,2,3,4 tentang Pajak penerangan jalan. Pasal-pasal ini begitu memberatkan para pelaku usaha di daerah dan juga membuat pemerintah daerah merasa dirugikan dengan pasal-pasal tersebut. Masalah terkait dengan implementasi UU ini, menarik perhatian KPPOD sebagai *civil society* untuk melakukan advokasi. Advokasi yang dilakukan oleh KPPOD bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah agar merubah UU tersebut. Sebagai salah satu *civil society* yang mempunyai fokus terhadap otonomi daerah dalam hal ini adalah dalam sektor ekonomi, KPPOD memiliki 2 pilihan strategi advokasi yang akan dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yaitu pra advokasi dan advokasi. Pra advokasi terdiri dari *mapping* kebijakan, kajian berbasis bukti, pelibatan stekholder sejak awal, dan berjejaring. Sedangkan untuk avokasinya terdiri atas diskusi media, seminar, roadshow ke kementerian lembaga/DPR, dan dokumentasi kajian kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang analisisnya menekankan kepada nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, landasan teori yang digunakan adalah teori *civil society* dan teori advokasi.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa UU No.28 Tahun 2009 titik beratnya masih pada fungsi *budgeter* dari pajak dan retribusi. Kedua pungutan ini masih berlandaskan pada pendapatan bagi daerah daripada menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi tersebut tercermin dari minimnya kualitas pelayanan dan infrastruktur yang semestinya dinikmati publik sebagai pembayar pajak. Titik berat dari UU ini terlihat dari adanya pasal-pasal yang memberatkan masyarakat terutama para pelaku usaha. Masalah ini ditemukan oleh KPPOD ketika turun lapangan, sehingga KPPOD merasa bahwa UU tersebut harus di advokasi agar pemerintah dapat membuat UU baru yang bisa mengakomodir perjalanan pajak dan retribusi di daerah. Ketika upaya advokasi dilakukan KPPOD dengan berbagai strategi, saat itu pemerintah sedang menyiapkan draf revisi UU No.28 tahun 2009 dimana isi draf ini sama sekali tidak menjawab persoalan dari UU yang lama, sehingga pemerintah dan DPR menyepakati bahwa draf revisi ini tidak dilanjutkan dan tidak masuk ke prolegnas tahun 2020.

Kata Kunci: strategi advokasi KPPOD, Masyarakat Sipil, Kebijakan Pemerintah

ABSTRACT

Taxes and local levies contained in Law No.29 of 2009 are a legal umbrella for the government in collecting taxes to the public. Levies consisting of taxes and levies constitute the largest revenue for the country, the presence of local taxes and levies is not only a matter of budget but local taxes and levies are directed to meet services to the public. During the course of Law No.28 of 2009 concerning regional taxes and levies, there have been very significant problems, namely the existence of articles originating in their implementation, including Article 32 paragraphs 1,2,3, Article 35 paragraph 1, concerning hotel taxes , article 37 paragraph 1,2,3, article 40 paragraph 1, concerning restorant tax, article 54 paragraph 1,2, article 55 paragraph 1,2,3,4 concerning street lighting tax. These articles are so burdensome for business actors in the region and also make local governments feel disadvantaged by these articles

Problems related to the implementation of this Act, attracted the attention of KPPOD as a civil society to conduct advocacy. Advocacy carried out by KPPOD aims to influence the government to change the law. As one of the civil society that has a focus on regional autonomy in this case is in the economic sector, KPPOD has 2 choices of advocacy strategies that will be carried out to influence government policies namely pre advocacy and advocacy. Pre advocacy consists of policy mapping, evidence-based studies, stakeholder involvement from the start, and networking. As for the avocation, it consists of media discussions, seminars, roadshows to the ministries / institutions of the DPR, and documentation of policy studies. This research uses a descriptive qualitative approach whose analysis emphasizes the value or meaning contained behind facts. The data sources used are primary and secondary data, the theoretical basis used is civil society theory and advocacy theory.

Based on the data analysis, it was concluded that Law No.28 of 2009 focused on the budgetary function of taxes and levies. Both of these assessments are still based on income for the region rather than being the basis for providing services to the community either directly or indirectly. This condition is reflected in the lack of quality services and infrastructure that should be enjoyed by the public as taxpayers. The emphasis of this law can be seen from the existence of articles that are burdensome to the community, especially business actors. This problem was discovered by KPPOD when it went to the field, so that the KPPOD felt that the Act had to be advocated so that the government could make a new law that could accommodate travel taxes and levies in the regions. When KPPOD conducted advocacy efforts with various strategies, at that time the government was preparing a draft revision of Law No.28 of 2009 where the contents of this draft did not address the problems of the old law, so the government and the House of Representatives agreed that the draft revision was not continued and did not enter to the National Education Program in 2020.

Keyword: KPPOD advocacy Strategies, Civil Society, Government Policy